

PERAN PEMUDA SEBAGAI KADER BELA NEGARA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM

Mery Kathryn Kurniawati Br. Panjaitan¹

Abstract

This paper explains to what extent the role of youth as a the state cadre of national defense can contribute in supporting maritime security, especially on the outer islands of the Republic of Indonesia. This article seeks to raise new ideas about youth planning activities in order to foster maritime culture for building Indonesia as a world maritime fulcrum. As part of the whole society, the role of youth is of importance for channelling their talents, creativity, spirit and real active role in state development which is based on community service.

Keywords: state defense, youth, defense, security, maritime.

¹ Mery Kathryn Kurniawati Br. Panjaitan adalah dosen pada Fakultas Keamanan Nasional – Program Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Indonesia. Email: kathryn.panjaitan@gmail.com.

Pendahuluan

Indonesia sebagai *The Biggest Archipelagic state* dengan luas perairan laut mencapai 5,9 juta Km² dan garis pantai sepanjang ± 81.00 km² di kawasan tropis yang berdaya dukung alam tinggi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kemampuan *Mega Biodiversity* sehingga dapat menarik negara lain untuk masuk ke perairan Indonesia (Marsetio). Berdasarkan fakta ini, pertahanan dan keamanan wilayah laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting terutama pada daerah perbatasan yang merupakan akses utama negara lain untuk memasuki kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya melindungi wilayah kedaulatan Indonesia, pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yang menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung, dimana setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2. Pembelaan negara selain merupakan kewajiban hukum, juga menjadi hak dan kehormatan sebagai warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, pasal 17 hingga pasal 25. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam melindungi wilayah negara adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara sadar dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pelaksanaan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara dapat diterapkan dalam pendidikan bela negara. Bela Negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya (Wira, 2016). Sampai dengan saat ini, pendidikan bela negara banyak diterapkan dalam dunia pendidikan di kalangan peserta didik dan menargetkan pemuda sebagai kader utama bela negara. Hal ini merupakan salah satu cara yang sesuai dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang dilaksanakan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka revolusi karakter bangsa melalui aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang menempatkan aspek sejarah pembentukan bangsa, nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dalam pendidikan Indonesia (Jokowi, 2014). Melalui pendidikan

bela negara diharapkan pemuda dapat menjadi agen perubahan dan sebagai aset pertahanan bagi keamanan maritim negara.

Pembahasan

Pengelolaan Sumberdaya untuk Pertahanan dan Keamanan Maritim NKRI

Geografi Indonesia yang luas dan strategis serta dikaruniai sumber daya kekayaan alam yang melimpah ruah, merupakan potensi untuk menjadi bangsa yang besar sekaligus berpotensi besar juga untuk membahayakan kedaulatan NKRI. Ancaman yang mungkin muncul di seluruh wilayah perbatasan tersebut dapat bersifat multi-dimensional yang berasal dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya atau permasalahan pertahanan dan keamanan (Wira, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Menurut Permen No. 19 Tahun 2015, ada beberapa jenis ancaman yaitu berupa ancaman militer, non-militer, dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkoba; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional).

Berdasarkan geografi dan keamanan kedaulatan negara, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi

keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Jokowi, 2014).

Terdapat tujuh kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar yang memiliki total 92 pulau kecil terluar yang tersebar di seluruh perbatasan laut NKRI. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan wilayah negara, hak-hak berdaulat, yang dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama (Per. No. 1 tahun 2015).

Deklarasi mengenai visi pembangunan kelautan tercantum dalam “Deklarasi Bunaken” pada tanggal 26 September 1998 yang berisi laut adalah kurnia Tuhan, laut nusantara bersama darat dan udara di atasnya merupakan wadah kesatuan dan persatuan bangsa, mengandung kekayaan alam yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, laut adalah peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia sehingga visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia berorientasi ke laut dan semua jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dalam pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia (Marsetio).

Berdasarkan hal ini, pemerintah telah membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Peningkatan produksi perikanan setiap tahun mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan protein hewani untuk gizi masyarakat dengan produksi tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton (Permen KP, 2015) dengan nilai ekonomi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan sebesar USD 47 miliar per tahun (Marsetio).

Dalam menjalankan visi kelautan sebagai poros maritim dunia dan visi nasional “Terwujudnya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”, presiden telah menetapkan misi, salah satunya yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. TRISAKTI ditetapkan sebagai basis arah perubahan, salah satu poinnya yaitu “Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan” (Jokowi, 2014). Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila dimana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangan yang akan dihadapi.

Dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 salah satu sasaran pokok pembangunan nasional pada poin pengembangan ekonomi maritim dan kelautan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dengan sasaran 31 pulau. Berdasarkan hal ini, peningkatan produksi perikanan dan nilai ekonomi perikanan negara akan meningkat bila pengembangan ekonomi maritim di pulau kecil terluar bisa dilaksanakan dengan maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan terluar. Peningkatan ekonomi perikanan dapat pula mendukung jalannya salah satu agenda aksi yang berisi menjamin integritas NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan dan mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2017, salah satu pilar dalam kebijakan kelautan Indonesia adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya kelautan secara optimal dan berkelanjutan dengan prinsip ekonomi biru dan teknologi ramah lingkungan. Selain pengelolaan sumber daya, pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang perlu dikembangkan untuk mencetak profesional dibidang kelautan yang berdedikasi dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Menurut Permen Nomor 19 tahun 2015 mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan tahun 2015-2019, strategi pertahanan negara diwujudkan dengan mentransformasikan potensi sumber daya dan sarana prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang dilandasi dengan pemahaman kesadaran dan kemampuan bela negara.

Berdasarkan sifat gotong royong, pokok pembangunan nasional yang berdasarkan agenda aksi serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan, gotong royong seluruh masyarakat dalam keamanan dan pertahanan maritim sangat dibutuhkan terutama untuk mengelola sumberdaya alam kelautan dan mengamankan pulau-pulau terdepan sebagai kekuatan pertahanan guna membangun perkembangan ekonomi maritim dalam rangka menjamin integritas dan kedaulatan NKRI.

Pendidikan dan Bela Negara

Ketahanan nasional perlu ditingkatkan dan dipupuk secara terus menerus berdasarkan wawasan nusantara melalui upaya pembangunan nasional di segenap aspek dan dimensi kehidupan. Saling keterkaitan antara wawasan nusantara, ketahanan nasional dan pembangunan nasional, menempatkan wawasan nusantara sebagai pedoman, tuntunan dan rambu pemandu bagi perwujudan ketahanan nasional (Kemenristekdikti, 2016). Salah satu cara dalam memupuk dan membangun ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara adalah dengan cara memberikan pendidikan sejak dini kepada warga negara sehingga akan menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab, sadar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, cinta tanah air dan mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara sehingga dapat mendukung kekuatan dalam Sishaneg.

Menurut Marsetio, salah satu permasalahan Indonesia dalam permasalahan kemaritiman yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mental bahari bangsa yang masih lemah. Salah satu strategi pembangunan jati diri sebagai negara maritim adalah meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat (Jokowi, 2014). Menyoroti masalah kemerosotan mental suatu bangsa, perlu adanya peningkatan dan penanaman kembali nilai-nilai jati diri suatu bangsa kepada seluruh warga negara diantaranya adalah melalui pendidikan kewarganegaraan yang selama ini sudah jarang didengar dan

disampaikan baik dilingkungan dunia pendidikan maupun lingkungan masyarakat secara umum (Kemenristekdikti, 2016).

Bela negara merupakan benteng dan salah satu cara bagi negara dalam menyelamatkan kelanggaan kehidupan berbangsa. Pemantapan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi warga negara, merupakan implementasi pencapaian sasaran strategis terhadap nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai tersebut meliputi: cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai Ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kualitas warga negara yang memiliki nilai-nilai bela negara akan memperkuat sistem pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

Menurut Menristek Dikti, pembelajaran Bela Negara di perguruan tinggi harus diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kurikuler, ekstra kurikuler dan kokurikuler secara luas sebagai pendidikan yang menekankan pada penguatan karakter kebangsaan. Pembelajaran Bela Negara dapat membangun tradisi, etos kerja, dan meletakkan nilai-nilai luhur sebagai landasan pengembangan intelektualitas seiring profesionalitas dan vokasionalitas.

Bela negara dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan latihan (Diklat) serta sosialisasi sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh terhadap ketersediaan sumber daya pertahanan. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan dimana warga negara mengikuti pendidikan formal mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui kurikuler dan ekstra kurikuler dan pendidikan nonformal.

Pembentukan kader bela negara dilakukan dengan membentuk sikap mental dan perilaku yang memiliki semangat patriotisme sesuai peran dan profesi setiap warga negara. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan pemerintah menargetkan 100 juta kader bela negara yang militan diseluruh wilayah Indonesia dan akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara (Pakmun, 2016).

Pembentukan kader tersebut ditempuh melalui program reguler dan program khusus sesuai dengan Desain Induk yang disiapkan. Program reguler diperuntukkan bagi warga negara yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan bela negara. Sedangkan program khusus diperuntukkan bagi warga negara yang pernah mengikuti

kegiatan pelatihan, untuk melaksanakan kegiatan penyegaran guna mencapai standar kader bela negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Pemuda dan Kegiatan Kepemudaan

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mencatat peranan penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi kemerdekaan (1945), pergerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa (1966) sampai dengan pergerakan mahasiswa (1988) yang membawa bangsa Indonesia memasuki masa Reformasi. Hal ini merupakan pembuktian bahwa Pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pembangunan bangsa (UU Kepemudaan).

Pada peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, wakil-wakil pemuda kita di seluruh Indonesia berikrar: “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Makna yang terkandung, antara lain, segenap komponen bangsa harus mencintai Tanah Air dan harus menjaga keutuhan Indonesia. Keutuhan NKRI harus dijaga mati-matian. Hal itu berarti semua pihak harus bekerja keras menjaga keutuhan bangsa, melawan mati-matian kelompok mana pun yang hendak mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa kita. Semua komponen bangsa juga harus bekerja keras untuk memajukan bangsa supaya bangsa Indonesia perlahan tapi pasti bisa berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa lain di mana pun (Wira, 2016).

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia enam belas sampai tiga puluh tahun yang memasuki periode penting perkembangan. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada dimensi kehidupan. Pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan dan membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (UU Kepemudaan).

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan potensi pemuda yang dilakukan oleh pemerintah dengan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai bidang perlu diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya, prestasi dan semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya pemerintah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang fasilitas dan bimbingan sesuai dengan peraturan perundangan.

Selain sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan, pemuda memiliki tanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga keutuhan NKRI, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum. Pemuda juga memiliki tugas untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, ketahanan budaya nasional serta meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Dari keseluruhan uraian mengenai pemuda, tanggung jawab dan peran aktifnya, dapat disimpulkan bahwa peranan pemuda merupakan kekuatan besar dalam pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui peningkatan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, peneguhan kemandirian pemuda, peningkatan jasmani, seni dan budaya, penyelenggaraan penelitian dan pendampingan serta penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.

Pemerintah perlu membuat wadah supaya pemuda dapat menyalurkan bakat, kreativitas, semangat dan peran aktifnya dalam pembangunan negara yang nyata yang berbasis pengabdian masyarakat. Dalam hal ini pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah membuat sebuah agenda “Ekspedisi Nusantara Jaya” yang mempertemukan pemuda dari berbagai golongan dan latar belakang pendidikan untuk menumbuhkan semangat kemaritiman dengan mengirimkan pemuda-pemuda ke kepulauan-kepulauan terluar di Sabang hingga Merauke dengan misi membangun negeri. Kegiatan ENJ banyak bergerak pada bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini bermaksud untuk mengenalkan potensi budaya dan pariwisata Indonesia, menggali potensi pribadi, melatih kepemimpinan, melatih kepedulian sosial, peningkatan bela negara, dan peningkatan kecintaan para pemuda terhadap NKRI. Para

pemuda dituntun untuk meningkatkan wawasan kemaritiman dan mendarmabaktikan segala potensi yang dimilikinya melakukan penguatan konektivitas di pulau-pulau terdepan, terpencil dan wilayah perbatasan, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat bakti sosial seperti peningkatan akses terhadap kebutuhan bahan pokok sehari-hari, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, serta percepatan pembangunan di wilayah pulau-pulau dan perbatasan. Program ini merupakan kegiatan untuk menghadirkan negara melalui para pemuda ke daerah terdepan, terpencil dan daerah perbatasan Indonesia yang banyak mengalami kesulitan dan ketertinggalan antara lain secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Kemenkomaritim, 2016). Kegiatan ENJ juga melibatkan beberapa perguruan tinggi dan didukung oleh perusahaan swasta, TNI AL dan beberapa kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian BUMN. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan banyak pemerintah daerah dan kota dalam pelaksanaannya.

Pada kegiatan ENJ Tahun 2017, tercatat pendaftar mencapai lebih dari 13.000 pemuda dimana kesempatan ini hanya dibuka untuk 3.068 pemuda. Angka pendaftar cukup membuktikan antusiasme pemuda untuk mengambil bagian dalam memberikan kontribusi pembangunan negara melalui kegiatan kepemudaan. Berdasarkan hal ini, perlu adanya kegiatan serupa yang melibatkan pemuda yang bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah tetapi merupakan bentuk peran aktif masyarakat dan sektor swasta lainnya dengan tujuan menunjukkan aksi nyata pemuda dan kontribusi menuju pembangunan negara.

Pelatihan kader bela negara yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia terutama yang dilakukan pada instansi pendidikan perlu disinergikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan peluang pemuda untuk menyalurkan semangat pemuda untuk kontribusi pembangunan wilayah terluar di sekitar instansi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait agar kegiatan mencapai sasaran dan tepat guna. Dalam pengelompokannya, pemuda dalam satu institusi pendidikan dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan lain serta mencakup berbagai latar belakang pendidikan formal (penjurusan dan fakultas) sehingga pengabdian masyarakat nantinya terarah dalam *teamwork* yang saling melengkapi sesuai dengan kemampuan serta ketertarikan masing-masing peserta. Kegiatan ini juga dapat diimplementasikan pada

institusi pendidikan di bawah kementerian. Diharapkan kegiatan ini dapat mencakup seluruh bidang yang dibutuhkan oleh daerah terluar terutama daerah kepulauan terluar sehingga terjadi sinergi yang dapat memperkokoh wawasan nusantara serta memupuk budaya maritim.

Materi yang perlu diterapkan pada pengabdian masyarakat perlu disesuaikan pula dengan kebutuhan serta potensi daerah yang dituju. Pendidikan dan penyuluhan merupakan materi yang perlu dikembangkan dalam pengabdian masyarakat. Di bidang pendidikan, pemuda diharapkan memberikan ilmu dasar mengenai keimanan, cinta tanah air, pengetahuan umum sesuai dengan tingkatan umur, *life skill* dan pengembangan budaya anak pesisir dan daerah terluar. Penyuluhan yang diharapkan, merupakan materi yang mencakup mengenai kebutuhan pengembangan sumberdaya di daerah tujuan seperti materi untuk pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan potensi daerah, serta pengarahan mengenai kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan untuk keberlanjutan usaha yang bertanggung jawab.

Bentuk gotong royong yang dilakukan merupakan hubungan kerjasama antar lembaga dan institusi dalam memberikan ruang untuk pemuda dalam memberikan talenta dan kemampuannya untuk bersatu padu mendharmabaktikan diri untuk kemajuan negara di daerah kepulauan terluar dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kesimpulan

Peran pemuda sebagai kader bela negara sangatlah besar bila dapat diarahkan dan mendapat dukungan yang baik. Banyak perubahan dan pergerakan yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk membangun pertahanan dan keamanan maritim melalui kegiatan nyata yang tepat di daerah perbatasan dan kepulauan terluar. Hal ini bukan saja menjadi tugas negara atau pemerintah dalam membekali dukungan untuk pemuda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah terluar melalui pendidikan dan penyuluhan, tetapi perlu adanya kerja sama seluruh pihak swasta, organisasi kemasyarakatan serta pembekalan instansi pendidikan. Hal ini guna meyakinkan bahwa pergerakan positif akan membawa peran pemuda menjadi salah satu ujung tombak pembangunan negara di daerah terluar untuk muncul menjadi daerah yang dapat

mengembangkan potensi dan melahirkan generasi yang berwawasan nusantara yang bercirikan budaya maritim dan berorientasi kelautan.

Pada akhirnya, pertahanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*) dapat terbangun melalui rasa kepedulian dan semangat gotong-royong dalam pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar serta kesadaran akan peningkatan peran aktif pemuda. Pemuda sebagai kader bela negara tidak lagi hanya mengisi kemerdekaan melalui kegiatan mengisi waktu semata tetapi sudah dapat menempatkan dan memosisikan diri sebagai warga negara yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa melalui kegiatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ketertarikannya dalam penerapan yang sejalur dengan fokus pembangunan negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sudah saatnya pemuda Indonesia sebagai kader bela negara memberikan kontribusi positif melalui kegiatan nyata yang bermanfaat dan membawa dampak pada pembangunan, pengembangan serta keamanan dan pertahanan maritim negara. Sudah saatnya pemerintah dan lembaga terkait membuat wadah yang mengumpulkan pemuda dari seluruh penjuru tanah air untuk membangun pelosok negeri hingga ke daerah kepulauan terluar melalui kerjasama yang bersinergi untuk kedaulatan NKRI.

Daftar Pustaka

- Jokowi dan Jusuf Kalla. (2014). *Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian – Visi Misi dan Program Aksi*, Setneg, Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. (2016). *Bersama Membangun Negeri – Ekspedisi Nusantara Jaya*, Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2014). *Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Media Informasi Kementerian Pertahanan WIRA edisi Khusus Bela Negara*, Puskom Publik Kemhan, Jakarta.

- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). *Panduan Program Hibah Pembelajaran Bela Negara*, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Marsetio. (2015). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Tangguh*, disampaikan pada acara Kuliah Umum di hadapan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pratimun. (2016). *Program Bela Negara Guna Menyikapi Kebhinekaan Bangsa Indonesia*, Seskoad, Bandung.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepemudaan*. UU Nomor 40 Tahun 2009. LN RI No. 148.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara*. UU Nomor 3 Tahun 2002. LN RI No. 3.
- _____. *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019*. Peraturan Nomor 1 Tahun 2015.
- _____. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019*. Permen Nomor 25 Tahun 2015. BN RI No. 1328.
- _____. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019*. Permen Nomor 19 Tahun 2015. BN RI No. 41.
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*. Perpres Nomor 16 Tahun 2017.